

ARTIKEL

Mengapa Partai Islam Belum Pernah Menang?: *Path Dependence Repetition* Kekalahan Partai Islam Indonesia Dalam Pemilu Legislatif 1955 Hingga 2019

Agus Riyanto

186-217

Gerakan Syarikat Islam Kembali Ke Khittah Tahun 1905

Gugun Wardiono, Bowo Sugiarto, Ahmad Rofik

218-239

Internationalization Of Islam *Rahmatan Lil 'Alamin* Through Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU): Motivation And Contribution

Andi Purwono

240-257

Dinasti Politik: Basis Politik dan Kepuasan Publik

Wimmy Haliim, Andy Ilman Hakim

258-273

Analisis Biopolitik Dan Kontrol Populasi Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana Di Kota Samarinda

M. Najeri Al Syahrin, Mochamad Dziaqie Aulia Al Farauqi, Sri Wahyuni Jamal

274-295

Pemanfaatan Modal Sosial Appi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Makassar

Hidayat Doe, Muhammad, Sukri, Ariana

296-312

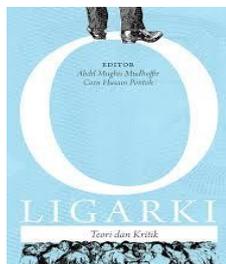
RESENSI BUKU

Oligarki Di Indonesia: Relasi Kapital Yang Dominan

Sunardi

313-317

RESENSI BUKU
OLIGARKI DI INDONESIA: RELASI KAPITAL YANG DOMINAN



Abdis Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh (Ed). *Oligarki: Teori dan Kritik*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2020. Cetakan: I. Halaman: xxiv+291. ISBN: 978-979-1260-95-4.

Sunardi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Email: sunardibombong@gmail.com

Fenomena oligarki pada proses elektoral sejak lima tahun terakhir di Indonesia mengundang cukup banyak perdebatan akademik. Penyebabnya, diskusi tentang varian teori oligarki yang selalu muncul disetiap hajatan demokrasi elektoral di Indonesia. Sebagai contoh, kemunculan dan kebangkitan kelompok-kelompok agamis yang bertautan dengan oligark dan kelompok oligarki yang bertransformasi dalam dukungan pada Pilkada di daerah. Sebagian sarjana memahami fenomena tersebut sebagai kemunculan varian oligarki yang berboncengan dengan populisme agama.¹ Tidak hanya itu, fenomena lain seperti kemunculan sosok dan figur dalam proses elektoral, yang secara historis tidak memiliki rekam jejak kedekatan dengan kelompok oligarki, terutama pada kelompok oligarki warisan Orde Baru, tetapi bisa memenangi kontestasi elektoral. Fenomena yang oleh sebagian sarjana menyebutnya sebagai kemunculan figur reformasi anti-oligarki.²

Di Indonesia, debat ini sesungguhnya sudah lama tersaji di kalangan para sarjana dan Indonesianis.³ Mengulik situasi ekonomi-politik dengan menempatkan konsep oligarki sebagai salah satu kacamata analisis. Tujuannya, para sarjana berusaha menjelaskan dengan saksama transformasi watak oligarki di Indonesia. Apalagi bahwa,

¹ Vedi R. Hadiz, *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah* (Depok: LP3ES, 2019). Sunardi, "Islamic Populism: Asymmetrical, MultiClass Coalition-Based Social Mobilization" dalam *Jurnal Politik*, Vol. 4, No. 2 (2019), h. 329-338.

² Edward Aspinall, "Popular Agency and Interests in Indonesia's Democratic Transition and Consolidation" dalam *Indonesia*, No. 96 (2013), h. 101-21. Thomas B. Pepinsky, "Pluralism and Political Conflict in Indonesia" dalam *Indonesia*, No. 96 (2013), h. 81-100.

³ Michele Ford & Thomas B Pepinsky, "Melampui Oligarki? Bahasan Kritis Kekuasaan Politik dan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia" dalam *Prisma*, Vol. 33 No. 1 (2014), h. 3-10.

konsep oligarki yang selama ini diturunkan oleh Jeffrey A. Winters perlu disesuaikan dengan konteks di Indonesia.⁴ Salah satunya, perkembangan kapitalisme di Indonesia yang relatif masih terbelakang, membuat konfigurasi oligarki memiliki ciri yang tentu saja tidak serupa dengan apa yang telah diamati oleh pemikir oligarki di tempat lain.⁵ Selain itu, dominan debat yang berlangsung selama ini masih terhenti pada tataran melihat oligarki sebagai tradisi Weberian, yang menempatkan *agency* sebagai fokus utama pengamatan.⁶ Imbasnya, oligarki sebagai kaca mata analisis lebih banyak bertumpu pada para elit dan konglomerat, yang hanya melihat oligarki dalam hal; Jika tidak memperluas kekayaannya secara ekonomi, maka konsep oligarki ditempatkan sebagai upaya pertahanan ekonomi elit dan para konglomerat.

Buku yang berjudul *Oligarki: Kritik dan Teori* dengan editor Abdis Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh hadir sebagai alternatif dalam memahami perkembangan oligarki yang secara kontekstual berlangsung di Indonesia. Menyuguhkan sembilan artikel dengan sudut pandang penulis yang berbeda menjadi kelebihan yang disajikan buku ini, seperti bangunan kokoh yang disusun dari beberapa penulis yang sangat kompeten. Secara garis besar, buku ini berangkat dari kritik terhadap konsep oligarki dari para Indonesianis, kemudian menawarkan argumen besar dari kritik terhadap konsep oligarki, bahwa oligarki bisa eksis di Indonesia karena ditopang oleh relasi kapital yang dominan. Buku ini sangat relevan untuk dijadikan sebagai salah satu bahan bacaan, terlebih bagi mereka yang ingin lebih paham tentang konsep dan perkembangan oligarki di Indonesia.

Politik Pengetahuan

Oligarki sebagai politik pengetahuan adalah argumen kritik pertama yang disampaikan buku ini. Mudhoffir dan Coen menganggap jika politik pengetahuan sebagai salah satu watak dari konsep oligarki yang selama ini dipopulerkan oleh para sarjana. Gagasan politik pengetahuan digunakan oleh Mudhoffir dan Coen untuk menyangkal tanggapan yang seolah-olah menempatkan konsep oligarki sebagai

⁴ Jeffrey A. Winters, "Oligarchy and Democracy in Indonesia" dalam *Indonesia*, No. 96 (2013), h. 11-33.

⁵ Abdis Mughis Mudhoffir & Coen Husain Pontoh (ed.), *Oligarki: Teori dan Kritik* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2020), h. xvi.

⁶ Michele Ford & Thomas B Pepinsky, *Loc.Cit.*

konsep usang di Indonesia. Tuduhan ini bagi Mudhoffir dan Coen tidak lebih dari upaya untuk mereduksi secara tidak langsung konsep oligarki dan di saat bersamaan memberi ruang lebih besar kepada literatur yang berbau modernisasi.⁷ Bagi Mudhoffir dan Coen, ini kesalahan fatal. Oligarki pada konteks Indonesia masih sangat relevan untuk didiskusikan. Hanya saja konsep oligarki perlu dilihat dengan perspektif alternatif dari sekedar apa yang selama ini disampaikan oleh para Indonesianis. Pasalnya, para Indonesianis selama ini melihat kondisi ekonomi-politik di Indonesia dalam bingkai modernisasi. Fenomena politik dianalisis dalam tradisi kuantitatif, berupa analisa hitung-hitungan survei yang ditopang dengan apa yang disebut oleh Mudhoffir dan Coen sebagai kemunculan pengamat selebritas yang menyampingkan pertanggung-jawaban teoritis terhadap apa yang disampaikan.⁸

Selain itu, tradisi modernitas dalam melihat kondisi ekonomi-politik di Indonesia bernuansa politik pengetahuan nampak pada peminggiran secara sistematis pendekatan Marxisme dalam memahami kondisi ekonomi-politik, kemudian di saat bersamaan menawarkan konsep-konsep lain, seperti konsep pemerintahan yang baik, konsep pertumbuhan ekonomi, konsep transisi demokrasi, sayangnya tawaran konsep-konsep ini bagi Mudhoffir dan Coen jarang bahkan nyaris tidak pernah menyentuh akar persoalan ekonomi-politik di Indonesia, yaitu tentang ketimpangan. Hasilnya, premis-premis yang ditawarkan pun semakin bias dari penyelesaian situasi sosial di Indonesia yang banyak ditopang oleh keadaan ekonomi. Keadaan inilah yang oleh Mudhoffir dan Coen sebut sebagai politik pengetahuan.

Monolistik

Kritik lain dari konsep oligarki yang disampaikan oleh Mudhoffir dan Coen adalah pandangan oligarki yang dipopulerkan selama ini oleh para sarjana terkesan sangat monolitik. Pandangan ini terutama lahir dari dua kutub Indonesianis yang selama ini silang pendapat tentang oligarki baik secara konsep maupun dalam ranah praktis di Indonesia. Secara umum kedua pihak melihat oligarki dengan tradisi Weberian yang secara bias memiliki pandangan yang sama, menempatkan oligarki dengan analisis *agency*. Walau kedua pihak melihat oligarki dengan titik berangkat yang berbeda. Satu

⁷ Abdis Mughis Mudhoffir & Coen Husain Pontoh, *Op.Cit.*, h. xi.

⁸ *Ibid.* h. xii.

pihak melihat jika oligarki merupakan upaya para konglomerat untuk mempertahankan kekayaan, sementara kubu yang lain melihat oligarki sebagai upaya para elit untuk memperluas kekayaan. Caranya dengan merebut instrumen kekuasaan yang wujud praktis pada Pilkada misalnya. Para oligarki akan menggunakan instrumen politik, dengan ikut secara langsung pada proses kontestasi atau menjadi pendonor pada para kontestan yang akan bertarung di gelanggang Pilkada.⁹

Kendati ada sebagian sarjana yang juga melihat kelompok reformis (anti-oligarki) yang mulai bermunculan sejak demokratisasi di Indonesia. Perhatian kubu ini terutama tidak berangkat dari elit dan para konglomerasi warisan Orde Baru, tetapi figur yang lahir dari proses demokrasi di Indonesia.¹⁰ Meskipun demikian, kubu ini tetap menaruh perhatian yang lebih besar pada aspek *agency*, yang secara umum tidak ada bedanya dengan para pengkritik oligarki sebelumnya. Sebagai dampaknya, Mudhoffir dan Coen melihat jika perspektif yang ditawarkan oleh para Indonesianis tentang oligarki di Indonesia tidak cukup memadai untuk menjelaskan peristiwa sosial yang berlangsung, terutama yang memiliki pertautan dengan keadaan ekonomi-politik kontemporer.

Kesimpulan: Relasi Kapital yang Dominan

Dari kritik yang telah dipaparkan di atas, penulis kemudian sampai pada kesimpulan bahwa oligarki di Indonesia bukan karena para konglomerat atau elit memiliki banyak pundi-pundi kekayaan, tetapi lebih dari itu, oligarki di Indonesia bisa eksis dan tetap mampu bertahan dalam setiap keadaan karena ditopang oleh relasi sosial, dalam hal ini adanya relasi kapital yang paling dominan. Situasi ini membuat para konglomerat punya ruang lebih besar untuk bertahan dan memperluas jejaring ekonominya dengan memanfaatkan instrumen-instrumen politik. Mudhoffir dan Coen menganggap jika oligarki di Indonesia bukan usang, tetapi perlu didekati dengan perspektif yang lebih kontekstual. Tawaran perspektif tentang oligarki yang relevan untuk konteks di Indonesia bagi penulis adalah mendekati oligarki dengan berangkat pada tradisi Marxisme, melihat oligarki sebagai produk dari relasi kapital yang

⁹ Jeffrey A. Winters, *Loc.Cit.* Vedi R. Hadiz & Richard Robison, "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia" dalam *Indonesia*, No. 96 (2013), h. 35-57.

¹⁰ Edward Aspinall, *Loc. Cit.*

dominan. Dengan begitu, pendekatan konsep modernitas, *agency* maupun konsep-konsep lain seperti tata pemerintahan yang baik relevan dilihat sebagai bagian dari upaya untuk memperluas jejaring ekonomi dengan menempatkan konsep-konsep tersebut sebagai sub-ordinat dari faktor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward. "Popular Agency and Interests in Indonesia's Democratic Transition and Consolidation" dalam *Indonesia*, No. 96 (2013), h. 101-21.
- Ford, Michele & Thomas B. Pepinsky. "Melampui Oligarki? Bahasan Kritis Kekuasaan politik dan kesenjangan ekonomi di Indonesia" dalam *Prisma*, Vol. 33 No. 1 (2014), h. 3-10.
- Hadiz, Vedi R. & Richard Robison. "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia" dalam *Indonesia*, No. 96 (2013), h. 35-57.
- Hadiz, Vedi R. *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*. Depok: LP3ES, 2019.
- Mudhoffir, Abdis Mughis & Coen Husain Pontoh (ed.). *Oligarki: Teori dan Kritik*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2020.
- Pepinsky, Thomas B. "Pluralism and Political Conflict in Indonesia" dalam *Indonesia*, No. 96 (2013), h. 81-100.
- Sunardi. "Islamic Populism: Asymmetrical, MultiClass Coalition-Based Social Mobilization" dalam *Jurnal Politik*, Vol. 4, No. 2 (2019), h. 329-338.
- Winters, Jeffrey A. "Oligarchy and Democracy in Indonesia" dalam *Indonesia*, No. 96 (2013), h. 11-33.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL POLITIK PROFETIK

Sebelum penulis mengirim naskah ke redaksi Jurnal Politik Profetik (JPP), sebaiknya mengikuti ketentuan dan sistematika penulisan di bawah ini:

A. Pedoman Untuk Artikel

1. Topik yang dipublikasikan oleh Jurnal Politik Profetik berhubungan dengan Politik Islam, Demokrasi, Pemilu dan Partai Politik, Gerakan Sosial Islam dan Politik Lokal.
2. Masalah yang diangkat sebaiknya kasus 5 tahun terakhir (jika penelitian lapangan) yang memuat unsur kebaruan.
3. Naskah belum pernah dipublikasikan.
4. Sumber rujukan minimal 75% berasal dari jurnal ilmiah/buku terbitan lima tahun terakhir. Disarankan mengutip satu sampai tiga artikel dari terbitan Jurnal Politik Profetik.
5. Naskah yang dikirim ke JPP tidak dibenarkan dikirim ke penerbit lain untuk dipublikasikan sebelum ada keputusan dari pengelola JPP, dimuat atau tidaknya.
6. Panjang artikel sekitar 6000-8000 kata, namun naskah yang lebih panjang akan dipertimbangkan.
7. Naskah harus diserahkan untuk dipertimbangkan melalui website Jurnal Politik Profetik pada link <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/about/submissions#online>
Submissions
8. Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas kertas ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4), spasi 1,5, huruf Times New Roman dan font size 12 pt..
9. Penulis harus bersedia untuk merevisi naskah berdasarkan masukan dari Editor dan Mitra Bestari.
10. Redaksi berhak menolak naskah yang tidak memenuhi kriteria/persyaratan teknis, mengadakan perubahan susunan naskah, memperbaiki bahasa dan berkonsultasi dengan penulis sebelum naskah dimuat.
11. Sistematika Penulisan:
 - a. **Judul Artikel**
Judul artikel harus padat, jelas dan tanpa singkatan. Jumlah maksimal 16 kata.
 - b. **Nama Penulis**
Cukup nama penulis tanpa menyertakan gelar
 - c. **Profesi/Institusi dan Email Penulis**
 - d. **Abstrak**

Abstrak berisikan tentang: tujuan dan manfaat mansukrip ini, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Pastikan kesemuanya itu dibuat dengan sepadat dan sejelas-jelasnya. Abstrak menggunakan Bahasa Indonesia dengan jumlah kata kisaran 150-250 kata.

e. Kata Kunci

Kata kunci merefleksikan ide pokok dari naskah. Kata kunci memuat maksimal 5 kata kunci.

f. Abstract

g. Keywords

h. Pendahuluan

Pendahuluan harus menggambarkan dengan jelas latar belakang masalah dan memuat pertanyaan apa yang akan dijawab dalam pembahasan. Bagian ini penulis mesti memberi argumen tentang pentingnya penelitian dilakukan. Pengutipan setiap karya tulis orang lain harus menggunakan Catatan Kaki/*Footnote* (Lihat Gaya Selingkung JPP). Istilah-istilah asing dicetak miring (*italic*).

i. Tinjauan Pustaka/*Literature Review*

Pada bagian ini semaksimal mungkin berisi uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Di sini perlu juga mempertegas kebaruan dari penelitian penulis.

j. Tinjauan Teori

Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bagian ini, penulis boleh tidak menuliskan Subbab “Tinjauan Teori”, namun langsung menuliskan subbab nama teori dan penjelasannya.

k. Metode Penelitian

Bagian ini memaparkan metode penelitian yang akan digunakan, di antaranya desain dan pendekatan penelitian, teknik pengambilan dan analisis data.

l. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, hasil penelitian dijelaskan secara komprehensif (singkat, padat dan jelas). Jika terdapat tabel dan gambar, atau figur-figur lainnya yang ada pada manuskrip, semuanya diletakkan simetris di tengah (seimbang antara kiri dan kanan). Bagian ini,

penulis boleh tidak menuliskan Subbab “Hasil dan Pembahasan”, namun langsung pada subbab inti persoalan yang sedang dibicarakan.

m. Kesimpulan

Kesimpulan menyesuaikan dengan apa yang diharapkan pada bagian pendahuluan di atas. Bagian ini dibuat dengan sesingkat dan sejelas mungkin.

n. Daftar Pustaka

Sumber rujukan minimal 75% berasal dari jurnal ilmiah/buku terbitan lima tahun terakhir. Disarankan mengutip satu sampai tiga artikel dari terbitan Jurnal Politik Profetik.

B. Pedoman Untuk Ulasan Buku

1. Harap sertakan di awal ulasan: Sampul Buku, Nama Penulis, Judul, Tempat, Penerbit, Tahun, Cetakan, Jumlah halaman, ISBN. Misalnya:



Syarifuddin Jurdi. *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Cetakan: I. Halaman: xxxviii+520. ISBN: 9786028479943.

2. Buku yang diulas merupakan buku terbitan 2 tahun terakhir.
3. Ulasan ditulis menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
4. Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas kertas ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4), spasi 1,5, huruf Times New Roman dan font size 12 pt..
5. Panjang rata-rata tulisan sekitar 2000-2500 kata.
6. Tinjauan harus dimulai dengan deskripsi singkat keseluruhan isi buku.
7. Hal-hal yang dapat dipertimbangkan dalam tubuh tinjauan meliputi:
 - Kekuatan dan kelemahan buku yang diulas.
 - Mengomentari gaya dan presentasi penulis.
 - Apakah tujuan penulis telah terpenuhi atau tidak.
 - Kesalahan (tipografi atau lainnya) dan kegunaan indeks.
 - Kepada siapa buku itu berguna dan direkomendasikan.
8. Penulisan referensi mengacu pada *Gaya Selingkung JPP*.
9. Sistematika Penulisan:

a. Judul

Judul ulasan harus padat, jelas dan tanpa singkatan. Jumlah maksimal 10 kata.

b. Identitas Buku

Identitas buku berisi Sampul Buku, Nama Penulis, Judul, Tempat, Penerbit, Tahun, Cetakan, Jumlah halaman, ISBN.

c. Nama Pengulas

Nama pengulas ditulis tanpa menggunakan gelar.

d. Afiliasi dan Email Pengulas

Institusi tempat pengulas bernaung serta alamat email yang dapat digunakan untuk berkorespondensi.

e. Isi Ulasan

Isi ulasan memuat tentang deskripsi singkat keseluruhan isi buku dan hal-hal yang dapat dipertimbangkan dalam tubuh tinjauan. Misalnya kekuatan dan kelemahan buku yang diulas, mengomentari gaya dan presentasi penulis, apakah tujuan penulis telah terpenuhi atau tidak, kesalahan (tipografi atau lainnya) dan kegunaan indeks serta kepada siapa buku itu berguna dan direkomendasikan.

f. Daftar Pustaka

Jika menggunakan sumber rujukan, maka pengutipan mengikuti *Gaya Selingkung JPP*.

GAYA SELINGKUNG JURNAL POLITIK PROFETIK

BUKU

Footnote:

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

Bibliography:

Jarry, David & Julia Jarry. *Collin Dictionary of Sociologi*. Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991.

ARTIKEL DALAM BUKU

Footnote:

¹Tom B. Bottomore, “Kelas Elite dan Masyarakat” dalam Sartono Kartodirdjo (eds.), *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 24.

Bibliography:

Bottomore, Tom B. “Kelas Elite dan Masyarakat” dalam Sartono Kartodirdjo (eds.). *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1990.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Footnote:

¹Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea” dalam *Development in Practice*, Vol. 17, No. 5 (2007), h. 679.

Bibliography:

Mkandawire, Thandike. “Good Governance: The Itinerary of an Idea” dalam *Development in Practice*, Vol. 17, No. 5 (2007), h. 679-681.

ARTIKEL PADA MEDIA MASSA

Footnote:

¹Masdar F. Mas’udi, “Hubungan Agama dan Negara” dalam *Kompas*, 7 Agustus 2002.

Bibliography:

Mas’udi, Masdar F. “Hubungan Agama dan Negara” dalam *Kompas*, 7 Agustus 2002.

ARTIKEL DARI INTERNET

Footnote:

¹Noer Fauzi Rachman, “Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia” dalam <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Rachman-2014-MP3EI-AMAN1.pdf> diakses 31 Mei 2018.

Bibliography:

Rachman, Noer Fauzi. “Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia” dalam <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Rachman-2014-MP3EI-AMAN1.pdf> / diakses 31 Mei 2017.

ARTIKEL PROSIDING

Footnote:

¹Noorhaidi Hasan, “Memahami Radikalisme Islam” dalam *Paper Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisasi Agama*, Depok, 19 Desember (2011).

Bibliography:

Hasan, Noorhaidi. “Memahami Radikalisme Islam” dalam *Paper Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisasi Agama*, Depok, 19 Desember (2011).

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Footnote:

¹Jumrah, “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan”. *Skripsi*. (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016), h. 10.

Bibliography:

Jumrah. “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016.

DOKUMEN RESMI

Footnote:

¹Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_.pdf diakses 1 Juli 2019.

Bibliography:

Mahkamah Konstitusi RI. “Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_.pdf diakses 1 Juli 2019.

WAWANCARA

Footnote:

¹Karaeng Tutu, Kepala Desa Bontoa, *wawancara*, 10 Juli 2019.

Bibliography:

Karaeng Tutu, Kepala Desa Bontoa, *wawancara*, 10 Juli 2019.

ATURAN PENULISAN FOOTNOTE (*Ibid.*, *Op.Cit.*, *Loc.Cit.*)

Ibid

Contoh

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

²*Ibid.*

³*Ibid.*, h. 193.

Penjelasan contoh

- Menggunakan Ibid karena merujuk kepada catatan kaki di atasnya tanpa diselingi catatan kaki lainnya.
- ²Ibid. berarti pengarang, judul, dan halaman sama persis dengan catatan kaki yang di atasnya.
- ³Ibid., h. 193. berarti pengarang dan judul sama persis dengan catatan kaki yang di atasnya, hanya berbeda halaman. Halaman sebelumnya 188 dan yang dikutip terakhir halaman 193.

Op.Cit.

Contoh

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

²Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea” dalam *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

³David Jarry & Julia Jarry, *Op.Cit.*, h. 193.

Penjelasan contoh

- Menggunakan Op. Cit. karena sebelumnya telah diselingi oleh catatan kaki lain, yaitu: ²Thandike Mkandawire.
- Penggunaan ³David Jarry & Julia Jarry, *Op. Cit.*, h. 193. berarti pengarang (David Jarry & Julia Jarry) dan judulnya (*Collin Dictionary of Sociologi*) sama, hanya saja halamannya berbeda dengan catatan kaki yang pertama. Halaman sebelumnya 188 dan yang dikutip terakhir halaman 193.

Loc.Cit.

Contoh

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

²Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea” dalam *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

³David Jarry & Julia Jarry, *Loc.Cit.*

Penjelasan contoh

- Menggunakan Loc. Cit. karena sebelumnya telah diselingi oleh catatan kaki lain, yaitu: ²Thandike Mkandawire.
- Penggunaan ³David Jarry & Julia Jarry, *Loc.Cit.* berarti pengarang, judul, dan halamannya (h. 188) sama.